

## BAB V

### KESIMPULAN

*Comfort women* merupakan istilah yang ditujukan kepada perempuan-perempuan pemuas kebutuhan biologis tentara-tentara Jepang pada Perang Dunia II. *Comfort women* menjadi sebuah permasalahan bagi Jepang dan Korea Selatan sejak tahun 1990an. Isu *comfort women* telah disepakati untuk diselesaikan dengan membentuk sebuah kesepakatan yang disetujui pihak Jepang dan Korea Selatan. Kesepakatan tersebut akhirnya resmi disahkan pada 28 Desember 2015 diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jepang dan Korea Selatan di Seoul. Kesepakatan tersebut bersifat “*final and irreversible*” yang artinya kesepakatan tersebut merupakan akhir dari perjalanan konflik *comfort women* antara Jepang -- Korea Selatan dan sifatnya tidak dapat diubah.

Kesepakatan tersebut berisi permintaan maaf secara resmi kepada Korea Selatan, disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang mewakili Perdana menteri Jepang Shinzo Abe. Disepakati juga bahwa pemerintah Jepang akan memberikan uang sebesar 1 Milyar Yen untuk mendirikan yayasan guna menanggulangi dampak psikologis bagi korban dan juga keluarga korban. Dari kesepakatan ini, pihak Jepang menginginkan agar patung gadis kecil yang berada di depan kedutaan Jepang di Seoul sebagai simbol dari *Comfort women* ini disingkirkan.

Kebijakan tersebut telah menjadi sejarah baru pada hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan. Pasalnya, isu ini telah dipermasalahkan selama lebih dari 20 tahun dan telah menjadi permasalahan yang cukup besar dalam melemahnya hubungan Jepang-Korea Selatan. Kesepakatan yang akhirnya dicapai oleh kedua negara memiliki kepentingan dari pihak Jepang sendiri. Meski isu ini selalu diangkat dalam forum nasional ataupun internasional, Jepang tidak pernah menganggap bahwa isu tersebut merupakan pertanggungjawaban Jepang.

Sehingga keberhasilan dalam membuat kesepakatan ini tidak lain karena adanya faktor-faktor pendukung dari pihak Jepang, 3 faktor utamanya yaitu : pertama, kondisi ekonomi Jepang yang membutuhkan kerjasama dengan negara lain. GDP Jepang telah mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. IMF mencatat adanya hutang Jepang sejumlah US\$ 11 triliun dengan rasio hutang mencapai 245% dari PDB (produk domestik bruto) negaranya ditahun 2015. Neraca perdagangan berangsur-angsur mengalami defisit dan kekuatan ekspor yang menurun dan impor energi yang meningkat. Masalah-masalah tersebut tentu tidak dapat diselesaikan sendiri. Jepang memerlukan kerja sama dengan pihak lain agar dapat menyuntikkan dana ke Jepang. Negara yang berpotensi dapat bekerja sama tentu merupakan negara yang sepadan dengan Jepang, Korea Selatan.

Kedua, adanya tuntutan dari dalam negeri Jepang. Sikap politik Jepang pada masa Shinzo Abe dianggap terlalu berpandangan kedepan tanpa melihat sejarah masa penjajahannya. Perusahaan Jepang yang berinvestasi di Korea Selatan dianggap tidak patriotik. Akibat permasalahan politik kedua negara, Jepang dan Korea Selatan, hubungan kerja sama pengusaha Jepang dan Korea

Selatan sempat membeku. pengusaha-pengusaha Jepang menganggap isu *comfort women* berdampak buruk bagi pengusaha-pengusaha Jepang untuk bekerja sama dalam bidang ekspor-impor dan investasi dengan pihak Korea Selatan. Mengingat ekonomi Jepang yang melemah dalam beberapa tahun terakhir, pengusaha-pengusaha mendesak Shinzo Abe untuk mencari solusi dalam menyelesaikan perdebatan isu *comfort women* dengan Korea Selatan.

Sikap pemerintah Jepang yang sedang menggadang-gadangkan feminisme di negaranya juga mendapat kritikan dari berbagai pihak. Kritikan tersebut dianggap berbanding terbalik dengan perkembangan isu *comfort women* yang masih tertunda. Meskipun Jepang berjanji akan membantu komunitas internasional dalam mencegah kekerasan seksual, pada kenyataannya Jepang masih terbelit dengan isu *comfort women* yang pada dasarnya merupakan kekerasan seksual pada masa perang.

Ketiga, konteks internasional, Amerika Serikat sebagai negara Sekutu Jepang dan Korea Selatan mendesak Jepang untuk mengubur masa lalunya dan bekerja sama dengan Korea Selatan dalam menghadapi kekuatan China dan ancaman Korea Utara. Korea Selatan sebagai pihak 'korban' juga telah mendesak Jepang untuk mengakui keberadaan *Comfort women* sejak tahun 1991, namun Jepang selalu menepis isu *comfort women* tersebut. Jepang selalu menolak keterlibatannya dalam kebijakan pembentukan *comfort women* pada saat perang dunia kedua berlangsung. Menanggapi sikap Jepang tersebut Korea Selatan mulai melakukan demo setiap hari Rabu di depan kantor Kedutaan Besar Jepang di Seoul dan mendirikan patung sebagai lambang *comfort women*.

Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye, menolak melakukan pertemuan bilateral antar kedua negara jika Jepang masih enggan menyelesaikan isu *comfort women*. Penolakan tersebut dilakukan sejak Park Geun Hye diangkat menjadi presiden Korea Selatan yaitu pada tahun 2013 sampai tahun 2015 saat Jepang memiliki inisiatif untuk menyelesaikan isu tersebut.

PBB sebagai organisasi terbesar ikut mendesak Jepang agar menyelesaikan isu *comfort women*. Korea Selatan bersama dengan Belanda, Prancis dan Korea Utara mendesak pemerintah Jepang untuk menyelesaikan isu *comfort women* pada *Human Rights Council's Universal Periodic Review(UPR)* di Jepang. Selanjutnya, masih ditahun yang sama, *Human Rights Committee(CCPR)* juga ikut mendesak pemerintah Jepang agar memberikan pertanggungjawaban yang legal dan meminta maaf kepada korban.

Penelitian ini hanya melibatkan negara Jepang dan Korea Selatan, namun dikarenakan adanya peran Amerika Serikat dalam setiap kebijakan luar negeri Jepang, penulis melibatkan peran Amerika Serikat. Waktu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini pada dasarnya sejak isu *comfort women* ini mulai dipermasalahkan hingga tahun 2015 saat kesepakatan penyelesaian isu tersebut dibuat. Dengan demikian situasi yang terjadi pasca kesepakatan ini dibuat tidak banyak disinggung. Kemudian untuk menjelaskan hubungan Jepang-Korea Selatan dan kemunculan *comfort women*, penulis memaparkan sejarah dari keduanya.

Keberhasilan dalam pembuatan kesepakatan ini tentu berpengaruh pada hubungan bilateral negara Jepang-Korea Selatan dan hubungan antar negara di

kawasan Asia Timur. Mitra dagang utama Korea selatan adalah China. Dengan diselesaikannya masalah *comfort women* diharapkan dapat mengubah pandangan Korea selatan terhadap Jepang dan menjadikan Jepang sebagai mitra dagang utamanya. Hal tersebut tentu akan berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian Jepang. Terbukti setelah kesepakatan tersebut dibuat, pada tahun 2016, Korea selatan dan Jepang mengadakan pertemuan untuk membahas kerjasama ekonomi bagi kedua negara.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca pengesahan kesepakatan ini tentu dapat diteliti lebih lanjut, dari perpektif para mantan *comfort women*, pemerintahan Korea Selatan, masyarakat atau LSM di Korea Selatan, babak baru dalam hubungan Jepang-Korea Selatan, hingga situasi di Jepang terkait dengan telah diselesaikannya isu *comfort women*.